

**TANGGUNGJAWAB ILMUAN SOSIAL DALAM
MEMPOSISIKAN PERAN DAN PERMASALAHAN BUDAYA
LOKAL UNTUK PENGUATAN ETIKA PLURALISME
BANGSA**

Sem Touwe¹

Universitas Pattimura

Jalan Ir.Putuhena Poka Ambon Telepon (09113825216/HP 085244767679

Email : drs.semt@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggungjawab Ilmuan Sosial dan perannya dalam melihat permasalahan yang terkait dengan nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman budaya, suku, ras, etnis, dan agama yang lebih dipopulerkan dengan istilah multikulturalis yang di negara Indonesia terkadang dipandang sebagai anugerah, tetapi juga hadir dalam pikiran-pikiran yang sempit sebagai malapetakah dan penyebab kehancuran. Padahal kehadiran multikulturalis di negara Indonesia sebagai prodak budaya lokal sudah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Data dan informasi dalam tulisan ini merupakan hasil *desk review* dari berbagai laporan penelitian, kajian buku dan dokumen serta pengalaman penulis saat melakukan penelitian-penelitian yang relevan. Permasalahan yang dijadikan inti pembahasan pada tulisan ini adalah , untuk menjadikan prodak budaya lokal yang multikultural itu tetap eksis dan dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat pendukungnya di Indonesia, maka Ilmuan Sosial harus terpanggil oleh kewajiban sosialnya, bukan saja sebagai penganalisa materi dan memberikan informasi lewat berbagai hasil kajiannya, namun juga sebagai corong atau prototipe dalam bentuk perujudan baik lewat sikap, moral, dan tindakan yang baik dalam masyarakat. Selain itu menyoroti bagaimana sikap seorang ilmuan sosial yang tampil memelopori multikulturalisme secara objektif, terbuka, dan berani menyampaikan gagasan kebenaran karena kebenaran berfungsi bukan saja sebagai jalan pikirnya, namun juga untuk jalan hidupnya. Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar Ilmuan Sosial di Indonesia secara sadar ikut bertanggungjawab terhadap produk keilmuannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama dalam hal keberadaan multicultural di negara Indonesia.

Kata kunci : Pluralisme sebagai prodak budaya lokal Indonesia peran ilmuan sosial.

Abstract

This study aims to explain the responsibilities of the Social Sciences and its role in looking at issues related to the values of togetherness in cultural diversity, race, ethnicity and religion more popularized by the term multiculturalism in the country of Indonesia is sometimes seen as a gift, but also present in narrow minds as malice and cause of destruction. Whereas the presence of multiculturalism in the country of Indonesia as a prodak of local culture has existed long before the country of Indonesia is formed. Data and information in this paper is the result of desk reviews of various research reports, book reviews and documents and the author's experience when conducting relevant studies. The main reason for this discussion is that in order to make the multicultural cultural prodak still exist and serve as the life guidance of its supporting community in Indonesia, Social Sciences must be called by its social obligation, not only as a material analyzer and provide information through various results his study, but also as a mouthpiece or prototype in the form of good manifestation through attitude, morals, and good actions in society. Besides highlighting how the attitude of a social scientist who appeared pioneered multiculturalism objectively, openly, and dare to convey the idea of truth because the truth works not only as a way of thinking, but also for the way of life. The conclusion of this paper shows that almost most of the social scientists in Indonesia consciously take responsibility for their scientific products and can be utilized by the society especially in the case of multicultural presence in the country of Indonesia.

Key words: Pluralism as a prodak of Indonesian local culture the role of social scientists.

I PENDAHULUAN

Secara etimologi *Pluralisme* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yakni, *Plural* yang berarti ragam dan *isme* yang berarti paham. Jadi pluralisme bisa diartikan sebagai berbagai paham, atau bermacam-macam paham. Secara terminology pluralisme merupakan suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi. Sedangkan *Pluralisme* dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama atas dasar persaudaraan dan kebersamaan, dilaksanakan secara produktif dan berlangsung tanpa konflik sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya. Pluralitas tidak bisa dihindarkan apalagi ditolak, meskipun manusia tertentu cenderung menolaknya karena pluralitas dianggap ancaman terhadap eksistensi dirinya atau eksistensi komunitasnya sebagaimana dijelaskan Arnold J. Toynbee (1953: 81) bahwa “Setiap budaya yang berbeda pasti menampilkan aspek yang bertentangan”. Toynbee memandang pluralitas dari dua sisi berbeda yaitu, Yang satu bersesuaian dengan makna asli “Budaya” artinya mengolah, dan melibatkan pengolahan kehidupan batin manusia dan peningkatan spiritualnya. Yang lainnya adalah pemaksaan adat suatu komunitas tertentu terhadap pihak lain secara agresif dan menaburkan bibit-bibit konflik di masa depan. Pada konteks ini penerapan konsep pluralitas atau multikultur melalui ilmu sosial sangat dibutuhkan untuk dipahami dan dipraktekkan oleh setiap komunitas plural seperti

Indonesia untuk dipahami secara mendalam oleh seluruh masyarakat agar dapat dipraktekkan pada semua segmen sosial saat ini.

Sejalan dengan pandangan Toynbee di atas, Salil Setty sekretaris Jenderal amnesty Internasional mengatakan bahwa dunia butuh Indonesia dengan warisan pluralismenya untuk mengawal dan menjaga perdamaian serta sikap saling menghargai satu dengan lainnya pada masa datang. Hal itu akan menjadi hadiah besar dari Indonesia untuk dunia yang pasti disetujui oleh seluruh bangsa. Ungkapan Salil Setty tersebut disampaikan pada acara ceramah yang diseleggarakan Yap Thiam Hien Foundation bekerja sama dengan Tahir Foundation, Indonesia legal Roundtable, dan Ikadin dengan tema "Pluralisme dan Perjuangan untuk Keadilan dan Kesetaraan" yang dilansir Kompas edisi 24 Maret 2017, di Jakarta. Lebih jauh, Salil Shetty mengidentifikasi adanya empat tanda yang dapat menyerang pluralisme dan toleransi di suatu bangsa. Tanda pertama bagi toleransi beragama dan tantangan pluralisme adalah munculnya demonisasi dan kebencian dari kelompok tertentu. Tanda kedua adalah diskriminasi, yakni ketika pemerintah melayani atau memperlakukan secara tidak setara satu kelompok dengan kelompok lain. Tanda ketiga adalah saat perundang-undangan digunakan untuk memaksakan hierarki agama di masyarakat. Terakhir adalah kekerasan atau kekejaman. Empat tanda tersebut harus menjadi pedoman untuk mengembalikan pluralisme dan kesetaraan di masyarakat. Ketika kita berpikir untuk melawan, kita harus memperhitungkan keempat hal itu.

Memang perlu disadari bahwa Pluralisme menggambarkan kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok etnik tidak teraktualisasi ke dalam identitas budaya etniknya, dan pada umumnya, kelompok ini memiliki perilaku yang berbeda contohnya; berbicara dengan bahasa yang lain dari bahasa etniknya, memeluk agama yang berbeda dari mayoritas agama yang di peluk etniknya, dll. Yaang perlu disadari bahwa terbentuknya pluralisme yang menjadi struktur dalam masyarakat umumnya menggambarkan perbedaan budaya di antara kelompok-kelompok etnik dan perbedaan tersebut hanya terletak pada wilayah struktur social yang mempunyai unsur budaya yang sama dengan budaya dominan dan mereka selalu tampil dengan budaya tertentu (*subkultur*) yang terpisah dari kelompok dominan. Untuk dapat mempertahankan adanya pluralitas dalam negara atau masyarakat maka, salah satunya dengan cara terus bertoleransi dan menjunjung tinggi nilai pluralism agar senantiasa tercapai persatuan dan rasa nasionalisme antarmasyarakat di setiap wilayah tanah air Indonesi mapun dunia. Negara Indonesia juga telah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya setiap masyarakat. Negara wajib menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (UUD 1945 Pasal 32). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (UUD 1945 Pasal 28I ayat 3).

Untuk mempertahankan pluralitas di Indonesia sesuai tuntutan UUD 1945 baik pada pasal 32 mengenai bahasa daerah, dan pasal 28I ayat 3 tentang indentitas budaya menjadi tanggungjawab bersama setiap warga bangsa Indonesia. Disinilah sebenarnya letak tanggungjawab dan peran besar para peneliti ilmu sosial dalam memposisikan dirinya selaku penerjemah karya-karya hasil garapan mereka secara objektif, transparan, dan menghindari unsur subjektivisme. Para peneliti sosial jangan berhenti hanya pada tahap rekonstruksi sebuah data atau fakta sosial saja, tetapi harus di sosialisaikan kepada masyarakat dimana karya sosial itu digarap. Untuk masalah

pluralisme di Indonesia, para peneliti sosioal perlu sepakat bahwa paktor ini merupakan bagian dari prodak budaya yang tumbuh dan berkembang dalam setiap komunitas lokal, sehingga perlu dilestarikan karena mengandung nilai positif untuk menjaga keharmonisan hidup bersama. Kerapuhan pluralitas sama saja dengan mematikan persatuan dan kesatuan warga masyarakat Indonesia yang multikultural dan dibangun pada pondasi kerangka negara kesatuan. Disinilah domain yang harus diperankan oleh peneliti ilmu sosial dalam menerapkan berbagai nilai positif dari pruduk multikultural kedalam ilmu sosial.

Kalau ada asumsi-asumsi dan pendekatan yang menempatkan pluralisme atau multikultural sebagai penyebab konflik, hal ini dikarena dangkalnya pemahaman mengenai pluralitas budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Untuk mengatasi pandangan seperti itu, perlu adanya rekonstruksi kembali soal arah dan strategi politik pembangunan kebudayaan maupun ekonomi, karena faktor-faktor ini merupakan salah satu determinan penting. Sedangkan langkah bijak dalam mengatasi krisis indentitas bangsa yang menolok pluralitas dan menjastivikasi pluralitas sebagai penyebab konflik, yang merendahkan roh kemanusiaan moderen, para ilmuns sosial harus berperan menemukan cara atau strategi baru mengenai penerapan pluralisme yang melekat pada budaya lokal di Indonesia, untuk kepentingan etika berbangsa dan bernegara. Muara besar dari tanggung jawab dan kerja keras peneliti sosial akan menjadi karya monumental dan dinilai sebagi pembentuk sejarah untuk kepentingan warga Indonesia dan dunia yang damai. Melihat kenyataan ini, patut kita renung dan diskusikan dalam penulisan ini menyangkut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan pada bagian rumusan masalah.

II RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan bagian pendahuluan dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pluralisme dan wacana kontemporer di mata peneliti sosial dewasa ini ?
2. Bagaimana agama dan budaya lokal dipandang sebagai simbol dan objek kemajemukan di Indonesia?,
3. Bagaimana pembelajaranan agama dan budaya dipahami menuju pluralisme di Indonesia?
4. Apa peran dan posisi peneliti sosial dalam melihat budaya lokal di Indonesia?

III TUJUAN PENULISAN

Sesuai rumusan masalah pada tulisan ini maka tujuan yang disasarkan dalam menjawab berbagai masalah yang dirumuskan dan menjawab pesan besar dari judu tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pluralisme dan wacana kontemporer di mata peneliti sosial dewasa ini
2. Menguraikan paktor penting yaitu agama dan budaya lokal yang dipandang sebagai simbol dan objek kemajemukan di Indonesia oleh para peneliti sosial.

3. Menjelaskan bagaimana cara yang tepat untuk pembelajaran agama dan budaya dipahami secara komprehensif menuju pluralisme di Indonesia
4. Menjelaskan peran dan posisi peneliti sosial dalam melihat budaya lokal di Indonesia

IV PEMBAHASAN

4.1. Pluralisme dan Wacana Kontemporer Di Mata Ilmuan Sosial

Yang menarik dari Indonesia dalam dekade terakhir ini adalah seolah-olah negeri ini menduduki peringkat sebagai bangsa percontohan segala macam wacana kontemporer. Fenomena ini tentunya tidak terlepas dari kacamata para ilmuan sosial untuk meresponnya. Ketajaman merespon berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan masalah pluralisme atau multikultural, sangat tergantung pada hal kebutuhan ataupun rangsangan dari peneliti sosial untuk merespon positif terhadap gagasan kehidupan pluralisme sebagai pengatur dinamisasi berbangsa. Contohnya kepedulian para ilmuan sosial dalam mengangkat tema penelitian mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk penerapan etika bangsa yang baik, telah mendorong kaum wanita untuk lebih berperan secara positif dalam berbagai sektor kehidupan. Konsep kesetaraan gender yang berperan sebagai pemacu dan pemberi peluang kepada para peneliti sosial untuk mengangkat tema ini, dianggap berhasil melahirkan keharmonisan yang seimbang antara laki dan perempuan untuk memahami lebih dalam dan melihat perbedaan sebagai sebuah anugerah dari Allah. Selain kesetaraan gender masih banyak fenomena sosial kemasyarakatan dan isu-isu modern lainnya yang memang selain dicari juga terkadang harus dipinang dan ditawarkan oleh para ilmuan sosial untuk diterapkan sebagai produk unggul menyongsong jati diri bangsa yang maju menjadi, besar, dan tertib. Wacana kontemporer global yang mendunia terutama menyangkut *Pluralisme* pada perkembangannya menjadi suatu wacana yang cukup ramai dibicarakan, terutama pasca reformasi 1998. Keramaian itu semakin menguat semenjak organisasi-organisasi keagamaan memutuskan fatwanya mengenai sekularisme, liberalisme dan pluralisme pada tahun 2005. Kemudian yang paling menarik untuk diperhatikan pasca reformasi adalah semaraknya respon publik yang diwakili oleh sejumlah LSM yang dengan antusias menyuarakan tiga isu tersebut, bahkan selama kurun lima tahun sejak pengharaman tersebut, tiga isu besar tersebut semakin menemukan performanya yang semakin matang.

Banyak LSM lokal, nasional dan internasional, mulai menyuarakan ketiga hal tersebut di atas dan sudah mulai mendapat perhatian publik sehingga dipahami dan didorong ke arah kemajuannya secara lebih leluasa dan terutama di Indonesia, ketiga hal tersebut diterima umum semenjak terbukanya gerbang reformasi tahun 1998, dan periode ini merupakan peluang untuk berekspresi termasuk para peneliti sosial. Hanya saja sebagai sebuah keharusan jika pesan-pesan tersebut terkandas melalui sesi pro-kontra dalam geliat

segenap penghuni negeri ini yang seakan-akan teggelam dalam arus pro kontra yang sampai sekarang masih dibincangkan oleh para elit di negeri ini. Mungkinkah proses tersebut akan terus berlangsung mengikuti gerak sejarah, hari kemarin, kini, dan hari esok. Gerak sejarah mengalami tahap pertumbuhan, perkembangan dan keruntuhan, sama dengan konsep perubahan ibarat gelombang dan arus akan terasa lebih tepat karena gelombang akan mengalami posisi naik-turun seiring prosentase argumentasi dan kuantitas masyarakat yang pro-kontra dalam menangkap isu-isu atau wacana kontemporer.

Yang lebih menarik bagi para ilmuwan sosial dalam mengamati pergulatan isu global yang terjadi di Indonesia adalah keselaluannya yang tergodok dalam ruang dan gerak wacana keagamaan. Hal ini menyangkut pada porsi kebangsaan yang religius di Indonesia, dan event tersebut didominasi oleh wajah agama yang memang telah lama diterjemahkan sebagai agama yang sensitive. Sensivitas bukan berarti ruang ini tertutup bagi peneliti sosial, dalam merekonstruksi berbagai budaya-lokal termasuk unsur-unsur religi yang terekam dalam kehidupan masyarakat, dan tentunya harus menimbang eksistensi dan profil keagamaan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena, **pertama** agama merupakan semacam filter dan kaca mata dalam masyarakat religius seperti Indonesia. Yang **kedua**, karena profil budaya lokal Indonesia hampir sebagian besar merupakan warisan budaya Hindu-Budha, Animisme, Dinamisme, dan segala bentuk kepercayaan leluhur dalam kesejarahannya. Jika terdapat satu dua tradisi lokal yang bernuansa Islam atau kristen, itu merupakan akulturasi, bukan aset total kebudayaan bangsa Indonesia.

Terlepas dari faktor-faktor di atas, memang secara ideal budaya seolah-olah memiliki dan menempati jalur utama yang telah terekam dalam agama. Pada sebagian definisi dijelaskan bahwa budaya mencakup akidah, norma (value), etika atau perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut dan tentunya adat-istiadat yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Clifford Geertz seperti yang dikutip oleh Bernard T. Adeney, 1995 dalam tulisannya Etika Sosial Lintas Budaya, mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem simbol dari makna-makna yang manusia mempraktekannya dan memberi makna pada sistem simbol itu. Sebab itu menurut Geertz kebudayaan “mengacu pada suatu pola makna-makna yang duwujudkan dalam simbol-simbol dan diturunkan secara kritis, untuk diwarisi, dilestarikan dan dikembangkan oleh manusia (Adeney, 1995 : 68).

Penelitian Gertz yang berjudul “*The Religion of Java*”, yang dilakukan pada tahun 1950 di Pare dan Kediri Jawa Timur, memberi gambaran bahwa ternyata di kalangan kaum muslim abangan masih banyak ditemukan praktek-praktek dan ritual yang bersumber dari ritual dan yang bersumber dari adat istiadat dan kepercayaan lokal (animisme) yang menjadi anutan kepercayaan sebelum mereka menganut islam (Faisal Ismail, 2012 :XVII) Dari beberapa pendapat diatas dapat dianalisis bahwa adat istiadat sebuah masyarakat adalah pondasi asli sebuah budaya, dan perilaku-perilaku yang dipraktekkan tanpa memperhatikan akidah yang membentuknya. Dengan demikian asumsi yang perlu dibangun adalah budaya merupakan sebuah faktor yang dapat memberikan arti dan menentukan arah kehidupan seseorang ataupun kelompok masyarakat menuju tatanan

hidup yang sempurna.

Berangkat dari berbagai definisi di atas, sangat layak untuk melahirkan respon positif untuk, membandingkan agama yang dibentuk oleh piranti keyakinan hati dan perilaku masyarakat. Bila dicermati dan dianalisa persoalan keyakinan dengan definisi budaya di atas, maka agama benar-benara merupakan bagian dari budaya karena budaya dalam definisi pertama meliputi keyakinan hati (akidah), perilaku, etika dan adat-istiadat, baik yang bersumber dari agama ataupun tidak. Dengan demikian, agama adalah bagian dari budaya. Namun, jika membandingkan agama dengan definisi budaya yang beranggapan perilaku dan adat-istiadat lahiriah (yang dijalankan oleh sebuah masyarakat) sebagai budaya, pertautan antara agama dan budaya tidak jauh berbeda dengan pertautan antara dua pranata (sebuah masyarakat) yang hanya bertemu pada beberapa titik konvergensi yang dimiliki oleh mereka. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa agama, secara utuh, merupakan bagian dari budaya atau sebaliknya. Boleh jadi definisi budaya yang berasumsi bahwa budaya adalah sebuah faktor yang mampu memberi arti dan menentukan arah kehidupan manusia, adalah definisi yang paling logis.

Yang menjadi masalah bagi para ilmuwan sosial dalam memandang permasalahan yang paling konkrit di negara religius seperti Indonesia mengenai posisi agama dan kebudayaan, adalah harus peka memandang sistem norma di berbagai daerah di Indonesia yang dihuni oleh masyarakat beragama. Di Indonesia ada dua sistem norma yang dominan: Pertama, norma-norma permanen dan tetap yang bersumber dari agama, dan kedua norma-norma yang dapat berubah setiap saat. Ada dua elemen penting dan mendasar dalam setiap bingkai kepercayaan lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas akan mempengaruhi spiritualitas, dan spiritual akan memberi warna pada lokalitas karena sama-sama, bersinergi. Spiritualitas lahir dan terefleksi dari asas ajaran kepercayaan lokal yang memunculkan ekspresi kerohanian dan praktek-praktek ritual sesuai doktrin kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku di daerah tertentu.

Dalam ekspresi spiritualitas dan praktek ritualitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tentunya ikut pula unsur lokalitas (tradisi, adat istiadat, kebiasaan dan seni budaya setempat) yang kemudian menyatu bersenyawa dan berintegrasi dengan unsur-unsur spiritualitas dan ritualitas. Semua ini membentuk konstruk sosiokultural, spiritual, ritual yang berpadu dalam rana kehidupan kepercayaan/agama suku. Dalam konteks seperti itu, maka rana kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari wilayah tradisi, kebiasaan, seni dan budaya. Sebaliknya, wilayah tradisi, kebiasaan, adat istiadat, seni atau produk budaya lainnya tidak dapat dipisahkan dari ranah kepercayaan. Tidak diragukan lagi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi atas kedua kelompok norma tersebut tidak akan mempengaruhi keduanya. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok itu berasal dari sumber yang berbeda. Itu berarti identitas budaya bangsa yang dibangun di atas piranti-piranti sosial kultural yang berbeda diyakini sama persis dengan isu pluralisme di Indonesia.

4.2. Agama dan Budaya Lokal Sebagai Simbol Kemajemukan Bangsa

Dalam konteks civilization, mazhab positivisme memposisikan agama sebagaimana seni dan sains sebagai bagian dari puncak ekspresi kebudayaan sehingga keduanya dikategorikan sebagai peradaban, bukan hanya sekedar culture. Namun bagi kalangan teolog dan orang-orang yang beragama, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Atau paling tidak, agama dan budaya masing-masing memiliki basis ontologis yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama bagaikan ruh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima ruh agama sehingga pertemuan keduanya melahirkan peradaban. Ruh tidak dapat beraktivitas dalam palataran sejarah tanpa jasad, sedangkan jasad akan mati dan tak sanggup terbang menggapai langit-langit makna ilahi tanpa ruh agama (Komaruddin Hidayat, 2003: 27).

Seperti itulah kebudayaan dalam keterkaitannya dengan agama, mengalami pertimbangan yang sangat mendetail antara perbedaan dan persamaannya terhadap agama. Ditambah lagi, kembali pada pembacaan watak keindonesiaan yang sangat kental dengan sikap keagamaan. Tentu kemajemukan Indonesia dilatarbelakangi oleh kemajemukan budaya, seperti agama, adat istiadat, sistem sosial, bahasa dan lain-lain.

Dilihat dari perspektif sosial budaya, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling majemuk dipandang dari segi banyaknya agama, kepercayaan tradisi, kesenian, bahasa, kultur dan etnis. Rut T. McVey dalam karyanya berjudul "*Indonesian Cultures and Communities*," yang dikutip oleh Heldred Geertz, menggambarkan khasana keberagaman Indonesia sebagai berikut: "Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari 250 jenis bahasa daerah dipakai di berbagai daerah. Hampir semua agama besar terwakili, selain agama-agama asli yang banyak jumlahnya"

Disini peneliti sosial harus memiliki alat pandang (metodologi) yang tajam untuk menyikapi keberagaman budaya sehingga budaya yang direkonstruksi akan lebih menarik dan menjadikan varian-varian profil budaya dalam suasana kebangsaan Indonesia. Dalam bahasan kemajemukan Indonesia, budaya lokal memiliki posisi, peran, sekaligus objek yang sangat kuat dan kentara. Melalui budaya lokal maka kemajemukan dapat terukur dengan banyaknya jenis kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk hal peran, kebudayaan sudah lebih cerdas untuk menyikapi perbedaan yang ada sejak era kenusantaraan, sehingga dengan sendirinya menjadi identitas bangsa. Untuk menggambarkan pluralitas masyarakat dan keberagaman budaya Indonesia, para pendiri republik ini telah mempergunakan moto "Bhineka Tunggal Ika" sebagai moto nasional.

Bhineka Tunggal Ika adalah bahasa sansekerta yang mengandung arti "Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu." Moto ini diambil dari gagasan berlian pujangga Empu Tantular, seorang pemikir cemerlang pada zaman kejayaan kerajaan Majapait yang muncul tahun 1293-1478 sebagai kerajaan Hindu terbesar sebelum kedatangan Islam ke nusantara, untuk memelihara komitmen kesatuan seluruh rakyat dan menjaga integritas wilayah kerajaan. Tujuan penggunaan kembali moto ini oleh para pendiri republik ini sebagai moto nasional adalah untuk mempertegas visi kebangsaan dan aspirasi sosial politik mereka guna merikat, merawat, mempererat dan memperkuat persatuan nasional, integritas wilayah

dan stabilitas negara Indonesia (Faisal Ismail, 2012 : xii).

Dengan pemahaman seperti itu jelaslah bahwa kebudayaan sudah memahami dirinya sendiri sebagai kebudayaan yang majemuk, memahami Indonesia yang sangat berragam, dan mampu memberi respon positif dalam setiap perubahan untuk menuju lebih baik, seperti akulturasi dan pengembangan. Sedangkan dalam pandangan budaya sebagai objek dari kemajemukan itu sendiri adalah budaya sebagai icon, dikarenakan budaya mengalami gesekan tersendiri sejak dahulu terutama dengan prinsip-prinsip pemahaman yang terbatas, namun tetap bertahan dalam tantangan jaman dan sampai saat ini diangkat menjadi produk unggulan oleh masyarakat pemeluknya.

4.3. Pembelajaran Agama dan Budaya Menuju Pluralisme Indonesia

Memang, hal yang paling sensitif ketika membicarakan isu pluralisme adalah agama. Meskipun konteks pluralisme tidak hanya bersinggungan dan konsen pada bidang teologi, hanya saja memperbincangkan segala ide maka dengan sendirinya akan berhubungan dengan ideologi, dan suatu keharusan ideologi akan bergulat pada keyakinan, iman, dan kepercayaan. Inilah agama, lembar terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menurut P.T. Raju dalam karyanya *“The Central Philosophy of Buddhism”* (1960 : 11-12), bahwa dua aliran berlawanan yang berkembang dalam kehidupan manusia dapat ditemukan pada permulaan filsafat Barat terutama gagasan yang berurusan dengan hakekat jasmani manusia. Raju menjelaskan bahwa menurut pandangan Hindu, bermacam-macam agama dipahami sebagai perspektif-perspektif berbeda dan kadang-kadang bertentangan mengenai satu realitas ilahi.

Menurut jalan pikir ini agama Hindu harus bersikap toleran dan terbuka terhadap agama-agama lain karena makin banyak segi ilahi dapat diamati, maka makin sempurnalah pemahaman kita terhadap sang ilahi. Pandangan yang hampir mirip dengan Raju mengenai hakekat ajaran Hindu adalah Radhakrishana. Ia melahirkan tanggapannya mewakili pandangan Hindu ortodoks terhadap tantangan agama Kristen dan dunia Barat moderen, mengatakan bahwa agama Hindu dan Veda tetap merupakan kebenaran agama yang sejati, namun suatu kebenaran yang dapat diterima secara universal oleh semua orang. Radhakrishnan dilukiskan sebagai seorang “Penghubung” antara dunia Timur (India), dan dunia Barat (Harold Coward: 1989: 136).

Di Indonesia persentuhan agama Islam yang lahir di tanah Arab dan kemudian dibawah masuk ke Jawa pada masa pemerintahan Ratu Sima (674-731), nampak jelas toleransi terbangun dalam sejarah Indonesia karena ada sikap toleransi umat beragama lain terhadap keberadaan Islam. Ternyata Ratu Sima merupakan tokoh penghubung antara dunia Jawa dengan Arab yang dianggap berhasil membangun kehidupan damai walaupun terdapat keragaman agama dan pandangan hidup (Wahid dan Ikeda, 2010: 62). Beragama sebagai gejala universal dari suatu masyarakat atau individu ternyata diakui oleh pemikir Prancis Bergson yang hidup pada tahun (1859-1941). Ia menulis bahwa kita menemukan masyarakat manusia tanpa sains, seni, dan filsafat, tetapi tidak pernah

ada masyarakat tanpa agama. Ungkapan Begrson menekankan universalnya fenomena beragama dalam keidupan manusia. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Edwar Norbeck bahwa agama bersifat universal pada masyarakat manusia, tetapi ia tidak mengakui beragam universal dalam keidupan individu. Menurut Norbeck, individu-individu yang non religius makin umum dikalangan masyarakat (Bustanudin Agus, 2007 : 3).

Ruang kedua setelah agama adalah budaya. Ada beberapa sesi pembahasan penting mengenai budaya ketika dihadapkan pada isu kontemporer berupa pluralisme. Pertama, dari segi posisi, budaya memiliki geliat yang sama dengan agama, kawasan yang memang menjadi ruang gerak pembahasan pluralisme, demi menciptakan kedinamisan yang majemuk dalam konteks multikultural Indonesia. Kedua, budaya sangat memiliki peran yang sangat penting dalam etika pluralisme di Indonesia. Budaya sangat berpengalaman mengenai kasus keberbedaan, dan juga jati diri keberagaman budaya telah menjadi ikon pluralisme itu sendiri. Pluralisme secara konseptual dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menghargai perbedaan dan mendorong kerja sama berdasar kesetaraan; terkandung makna “dialog” membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang berbeda, termasuk kerja sama mencapai tujuan searah.

Pluralisme dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama atas dasar persaudaraan dan kebersamaan; dilaksanakan secara produktif dan berlangsung tanpa konflik sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya. Pluralitas tidak bisa dihindarkan apalagi ditolak meskipun manusia tertentu cenderung menolaknya karena pluralitas dianggap ancaman terhadap eksistensinya atau eksistensi komunitasnya. Melalui pembelajaran terhadap keberagaman budaya diharapkan dapat mengambil peran sebagai alat utama menuju kehidupan etika pluralisme Indonesia yang baik, sekaligus diwujudkan menjadi sosok pluralisme budaya itu sendiri.

Norbeck Edward 1974, menulis *Religion in Humanlife* mengatakan bahwa peradaban merupakan fungsi penting kekhalfaan manusia. Kemajuan sebuah peradaban suatu bangsa merupakan hasil dialog dengan peradaban disekitarnya. Karena itu keterbukaan dan kebersamaan menjadi kata kunci penting. Tidak ada suatu bangsa yang memiliki peradaban tinggi tanpa keterbukaan cara berpikir. Demikian juga tidak ada dialog tanpa keterbukaan berpikir. Karena itu dialog dan keterbukaan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk membangun peradaban dan karakter sebuah bangsa (Wahid 2010 : 32).

4.4. Peran dan Posisi Ilmuwan Sosial Dalam Budaya Lokal di Indonesia

Akira Iriye, seorang guru besar Sejarah Amerika di Harvard University sejak abad ke 19 sudah mulai mengerakkan relasi kebudayaan sebagai kendaraan untuk membangun kerjasama diantara batas-batas kebudayaan dan kebangsaan. Gerakan ini memandang

kebudayaan sebagai kendaraan untuk membangun relasi kerja sama untuk mempromosikan pertukaran informasi dikalangan ilmuan melalui pendidikan dan kebudayaan (Akira Iriye, 1997: 68). Dalam tahun-tahun belakangan ini, jalinan kerja sama semacam ini telah dilakukan dalam berbagai aktivitas organisasi non pemerintah sedunia untuk mencapai apa yang dinamakan sebagai masyarakat sipil global. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Daisaku Ikeda bahwa “aktivitas-aktivitas kerjasama antar organisasi ini merupakan tanda-tanda awal munculnya tren ke arah apa yang diistilahkan sebagai interpopulisme kebudayaan atau suatu gerakan interaksi kebudayaan di mana warga masyarakat adalah para pemeran utama (Ikeda, 2001: 87)

Pandangan Daisaku Ikeda diperkuat oleh Ryosuke Ohashi, guru besar filsafat di Kyoto Institute of Technology yang mengatakan bahwa dikalangan intelektual Eropa secara luas istilah “Internasional” telah digantikan dengan konsep antar kebudayaan (interkultur). Ohashi menggambarkan dunia kontemporer kita sebagai persimpangan “sumbu vertikal keberagaman kebudayaan lokal dan sumbu horisontal teknologi yang menuju pada standarisasi dan kesemestaan” (Ohashi, 1999 : 52). Pandangan ini seakan membawa kita untuk melahirkan argumen bahwa keragaman tersebut merupakan khazanah bangsa yang sangat bernilai, tetapi di sisi lain keragaman yang tidak terkelola akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti sekarang sementara dihadapi bangsa ini. Ketimpangan ekonomi, sosial, politik, dan ketidak mampuan masyarakat memahami keragaman mengakibatkan pertikayan antar kelompok muncul di mana-mana. Masyarakat kurang memberikan apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan kultural, ras dan etnis, dan terkesan masih berada pada tahap mencari bentuk. Sebenarnya wacana mencari bentuk atau strategi dalam mengelola dan menerapkan tata kelola unsur pluralitas masih terhalang karena ruang untuk melakukan komunikasi lintas budaya yang sungguh-sungguh, dan bermakna belum dibudayakan. Padahal dengan memberikan ruang bagi relasi antar manusia merupakan salah satu langkah dalam meminimalkan kesalahan-kesalahan budaya. Interaksi antar individu dan antar kelompok budaya selama ini tidak lebih dari komunikasi yang semu, tidak sungguh-sungguh. Pada domain ini posisi dan peran peneliti sosial sangat berperan untuk menjembatani ruang-ruang sosial budaya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, religi, struktur-struktur sosial yang masih tertutup bagi public

4.4.1. Peran Ilmuan sosial

Peran merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok untuk menentukan arah atau tujuan dari suatu maksud yang diinginkan. Peran juga dapat didiskripsikan sebagai tanggungjawab seseorang atau kelompok untuk menjalankan misi atau strategi dengan sasaran mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian peran ilmuan sosial sangat diharapkan untuk mentransformasikan hasil penelitiannya pada setiap segmen sosial, baik pada rana sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat umum. Ilmuan sosial harus mampu dan berperan menyusun strategi model-model peningkatan integrasi sosial melalui pengembangan komunikasi lintas budaya berbasis budaya lokal pada masyarakat multikultural. Integrasi sosial yang diharapkan

adalah upaya membangun rasa kebersamaan dalam suatu wilayah, dengan melepaskan simbol-simbol primordial yang lebih sempit. Ilmuwan sosial juga harus berupaya menjembatani integrasi sosial mulai dari segmen grass root, bukan desain kelompok atau penguasa, harus ada kekuatannya yang menjai perekatnya seperti norma, saling percaya, networking dan berbagai persamaan melalui pendekatan kultur. Nilai-nilai yang biasanya menguatkan integrasi sosial harus disosialisasikan oleh para ilmuwan sosial.

4.4.2. Tanggung Jawab Ilmuwan Sosial

Proses menemukan kebenaran secara ilmiah mempunyai implikasi etis bagi seorang ilmuwan sosial, dan karakter tersebut merupakan kategori moral yang melandasi sikap etis seorang ilmuwan sosial. Konsep ini berlaku umum untuk setiap ilmuwan karena merupakan bagian dari kegiatan intelektual yang melegitimasi kebenaran dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Menurut Suriasumantri bahwa tujuan akhir dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh setiap ilmuwan pasti akan mempengaruhi pandangan moral dari ilmuwan tersebut (Suriasumantri, 1998: 224). Ilmuwan sosial dalam upayanya untuk melakukan aktivitas keilmuan, ia juga harus merasa terpengaruh oleh kewajiban sosialnya.

Yang menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan sosial dalam merekonstruksi pluralitas sebagaimana diangkat pada tema pembahasan ini, harus memosisikan diri seobjektif mungkin dan terbuka untuk menerima pendapat orang lain karena semuanya merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Propesi keilmuan turut melekat pada diri Ilmuwan sosial sehingga tanggungjawab sosial bukan saja karena ia adalah warga masyarakat yang terlibat secara langsung di masyarakat tetapi yang lebih penting adalah prekwensi moralnya untuk membantu kelangsungan hidup manusia melalui hasil temuannya. Artinya ilmuwan sosial juga harus bertanggungjawab agar produk keilmuannya yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jawaban paper ini atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tidak akan memuaskan, tetapi dalam usaha memahami kenyataan pluralitas yang ada, maka tulisan semacam ini dipandang sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan bernegara.

V KESIMPULAN

Simpulan-Simpulan

Pluralisme merupakan kata yang pas untuk menyatakan keberagaman dan saling ketergantungan dalam kehidupan setiap individu atau kelompok masyarakat. Pemahaman pluralisme harus diakui secara sungguh-sungguh seperti yang dikatakan Profesor Tehranian dalam tulisan Daisaku “Demi Perdamaian”(2008:55), bahwa toleransi yang berakar pada cara memandang dunia sebagai keserbaketergantungan dinamis,

pasti menjadi sarana yang memungkinkan untuk melampaui ancaman bentrokan peradaban dan mewujudkan suatu filosofi kehidupan bersama yang akan memungkinkan kita untuk membangun suatu dunia manusia yang harmonis.

Dengan mengakui perbedaan dan memahaminya secara arif bahwa perbedaan-perbedaan itu sebagai rahmat Tuhan, pasti suatu toleransi yang sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Yang jelasnya pluralisme yang eksklusif tidak memberi jalan bagi terciptanya kehidupan harmonis integratif dalam masyarakat seperti Indonesia. Kita harus mengakui bahwa dari segi budaya maupun agama, negara Indonesia dengan wilayah yang begitu luas dari sabang sampai Merauke, merupakan negara dengan pluralitas yang sangat banyak. Tugas dan tanggungjawab kita sebagai warga negara khususnya para ilmuwan sosial diharapkan dapat menjembatani masyarakat untuk mengenali dan memahami pluralitas yang begitu banyak ini, sehingga dapat bersatu, terintegrasi tanpa mengingkari kemajemukan ditengah-tengah kita.

Para ilmuwan sosial juga diharapkan berperan menyadarkan masyarakat lewat karya-karyanya sehingga dapat melahirkan perasaan kebersamaan sebagai suatu bangsa yang terbentuk dari keragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa dan lain-lain. Peran semacam itu, bertujuan untuk tetap menjaga integrasi nasional yang kita capai selama ini. Muara dari tanggungjawab kita sebagai warga negara, terutama ilmuwan sosial, diharapkan timbul kesadaran warga bangsa bahwa Indonesia adalah wadah kita sendiri, milik kita bersama, tempat semua warga merasa betah karena identitas kultural dan religi diakui, sehingga tiap-tiap komunitas yang ada tidak merasa saling terancam. Payung besar untuk melindungi masyarakat yang plural adalah Pancasila, karena Pancasila adalah pengakuan hakiki terhadap realitas itu (Frans Magnis-Suseno: 2003: 35-36).

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Tercetak:

Buku dan Artikel

Agus Bustannudin, 2007,. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Perkasa.

Akira Iriye, 1997. *Cultural Internationalism end the World Order*. Baltimore Johns University Press.

Coward Harold, 1989. *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*. Jakarta: Kanisius.

Geerts Clifford, 1987. *Konflik dan Integrasi Agama dan Masyarakat di Mojokuto*

Dalam Bernard T. Adeney (ed), *Etika Sosial Lintas Budaya* Jakarta: Kanisius.

Kementrian Agama RI Puslitbang,2002. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Ohashi Ryosuke, 1999. *Ucbinaru Ikoku Sotonaru Nibon Kasoku Suru Inter-Culture Sekai*. Tokyo: Jinbunshoin.

Raju P.T. 1960. *The Central Philosophy of Buddhism* dalam Harold Cowad, Jakarta Kanisius.

Suseno Frans Magnis, 2003. “Agama Kerukunan dan Mmasyarakat Beradab” dalam *Harmoni Vol II*, No 6, April-Juni.

Toynbee. J. Arnold, 1953. *The World and the West*. London: Oxford University Press.

Wahid Abdurahman. KH. Dan Ikeda Daisaku, 2010. *Dialog Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian*. The Wahid Institute, Jakarta : Gramedia

Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum.

Tilar H.A.R.. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Surat Khabar/Internet :

Kompas edisi 24 Maret 2017, halaman 2

http://www.kompasiana.com/tnfinspiratif/pluralisme-budaya-dalam-nation-building-di-indonesia_552a7327f17e61210fd623af, di undu pada tanggal 11 September 2017 pukul 10,40

<http://andrieirawan89.blogspot.co.id/2009/09/pluralisme-budaya-dan-tantangan-arus.html>

23 Oktober 2015, di undu pada tanggal 11 September 2017 pukul 10.40